

Collaborative Governance Kebijakan Kemandirian Pangan untuk Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan

Collaborative Governance in Food self-sufficiency Policies for Poverty Alleviation in South Sumatra Province

Muhammad Firdaus Febriansyah*, Abdul Nadjib & Sena Putra Prabujaya

Program Studi Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya, Indonesia

Diterima: 17 Oktober 2024; Direview: 02 November 2024; Disetujui: 10 November 2024

*Corresponding Email: mfirdaus.unsri@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan Collaborative Governance dalam upaya penanggulangan kemiskinan melalui kebijakan kemandirian pangan di Provinsi Sumatera Selatan. Fokus penelitian terletak pada kolaborasi antaraktor dalam kebijakan kemandirian pangan sebagai upaya dalam mengurangi kemiskinan. Penelitian ini menggunakan teori dari Weber yang meliputi dimensi vertikal, dimensi horizontal, dan dimensi hubungan kemitraan. Data-data dikumpulkan melalui dokumentasi publik dan videotape online dan dianalisis secara kualitatif. Kajian ini menyimpulkan bahwa dimensi vertikal telah terpenuhi karena sudah terdapat dasar hukum terkait kebijakan mandiri pangan, dimensi horizontal yaitu adanya aktor dari non-pemerintahan yaitu Bank Sumsel Babel, serta dimensi hubungan kemitraan yang juga telah terpenuhi karena adanya perundingan yang mengikat antar aktor, pandangan mitra yang positif, serta adanya sumber daya manusia, dukungan politik, dan sumber daya finansial untuk penyelenggaraan kebijakan. Namun masih terdapat hambatan dalam hal tingkat kepercayaan. Maka dari itu kebijakan kemandirian pangan perlu terus dilakukan sosialisasi yang berkelanjutan agar dapat membangun kepercayaan antar mitra. Apabila hal ini telah di atasi maka bukan tidak mungkin kebijakan kemandirian pangan dapat menjadi solusi penanggulangan kemiskinan yang dapat diterapkan di seluruh Indonesia

Kata Kunci: Kebijakan Kemandirian Pangan; Collaborative Governance; Penanggulangan Kemiskinan.

Abstract

This study aims to examine the application of Collaborative Governance in poverty alleviation efforts through food self-sufficiency policies in South Sumatra Province. The focus of the research is on actor collaboration within food self-sufficiency policies as a strategy to reduce poverty. This study uses Weber's theory, which includes vertical, horizontal, and partnership dimensions. Data were collected through public documentation and online videotapes and analyzed qualitatively. The study concludes that the vertical dimension has been met, as there is a legal basis for food self-sufficiency policies; the horizontal dimension is evident through the involvement of non-governmental actors, such as Bank Sumsel Babel; and the partnership dimension is also fulfilled due to binding negotiations between actors, positive partner perspectives, as well as the availability of human resources, political support, and financial resources for policy implementation. However, there are still challenges related to trust levels. Therefore, ongoing socialization of food self-sufficiency policies is needed to build trust among partners. Once this is addressed, food self-sufficiency policies could likely become a viable solution for poverty alleviation across Indonesia.

Keywords: Food Self-Sufficiency Policy; Collaborative Governance; Poverty Alleviation.

How to Cite: Febriansyah, M.F., Nadjib, A., & Prabujaya, S.P., (2024), Collaborative Governance Kebijakan Kemandirian Pangan untuk Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan, *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 7(2): 499-507.

PENDAHULUAN

Kemiskinan, sebagai masalah sosial global, menjadi fokus utama dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Kondisi ini merujuk pada ketidakmampuan individu atau kelompok untuk mengakses sumber daya ekonomi, sosial, dan budaya yang memadai guna memenuhi kebutuhan dasar mereka, yang berdampak pada berbagai aspek seperti pendidikan, kesehatan, pangan, dan kebutuhan pokok lainnya (Sinurat, 2023). Kemiskinan adalah masalah kompleks yang terjadi di seluruh dunia, termasuk Indonesia, sehingga menjadi perhatian utama berbagai negara untuk mengatasinya (Sadayi et al., 2022).

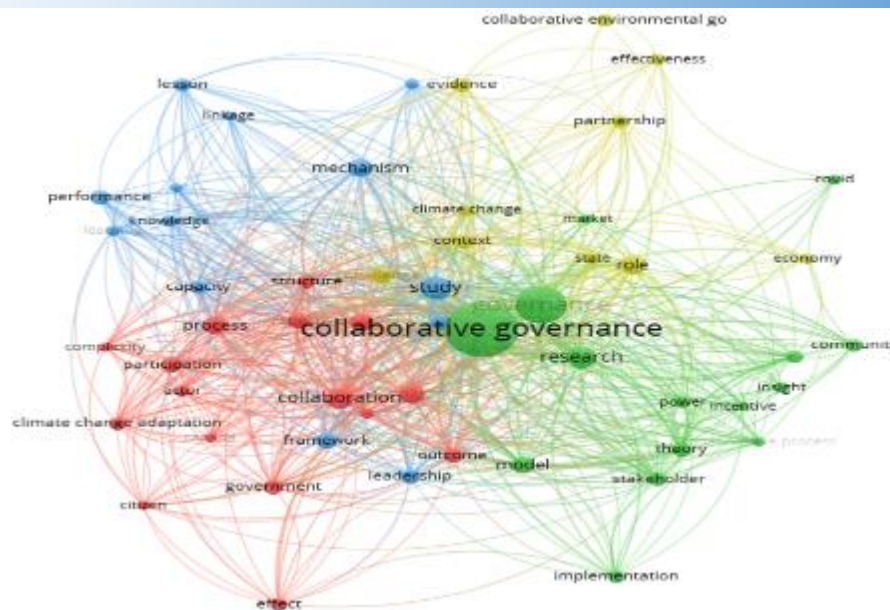
Salah satu pendekatan yang semakin banyak diterapkan dalam penanggulangan kemiskinan adalah melalui kemandirian pangan. Kemandirian pangan merupakan upaya menciptakan swasembada pangan di tingkat lokal dengan memberdayakan rumah tangga dan komunitas, terutama di daerah pedesaan, agar mampu memproduksi dan mengakses makanan yang cukup dan berkualitas. Pendekatan ini melibatkan berbagai kegiatan, seperti pertanian berkelanjutan, pelatihan keterampilan, dan pengembangan pasar lokal. Tujuannya adalah mengurangi ketergantungan pada bantuan eksternal dan memberdayakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka secara mandiri (Clapp, 2017). Provinsi Sumatera Selatan telah menerapkan pendekatan ini melalui Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (G-SMP). Berdasarkan (Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kemandirian Pangan, 2022), G-SMP dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dengan koordinasi bersama Kabupaten/Kota, mengarahkan rumah tangga untuk memanfaatkan lahan pekarangan sebagai sumber pangan melalui pertanian berkelanjutan. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan, sekaligus menambah pendapatan masyarakat.

Penanggulangan kemiskinan melalui kemandirian pangan melibatkan beragam aktor yang bekerja bersama dalam Collaborative Governance (CG), yakni pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil (Handayani et al., 2023). Pemerintah berperan penting dalam merumuskan kebijakan serta memberikan dukungan finansial bagi program-program penanggulangan kemiskinan. Sektor swasta berkontribusi melalui investasi dan pengembangan bisnis yang dapat menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan produksi pangan. Masyarakat sipil, termasuk organisasi non-pemerintah, berperan dalam pemberdayaan masyarakat lokal dan memastikan partisipasi aktif mereka dalam inisiatif kemandirian pangan.

Meskipun kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil diharapkan dapat menjadi pendekatan efektif dalam penanggulangan kemiskinan melalui kemandirian pangan, berbagai tantangan masih dapat muncul. Tantangan utama adalah perbedaan tujuan dan prioritas dari setiap aktor, di mana pemerintah cenderung fokus pada aspek regulasi, sementara sektor swasta lebih berorientasi pada profitabilitas. Selain itu, konflik kepentingan, keterbatasan sumber daya, dan tantangan logistik juga dapat menghambat efektivitas kolaborasi. Oleh karena itu, penting untuk memahami dinamika kolaborasi ini dan mencari solusi agar semua pihak dapat bekerja bersama secara sinergis dalam penanggulangan kemiskinan melalui kemandirian pangan.

Penelitian mengenai CG telah berkembang mencakup berbagai aspek keilmuan, seperti lingkungan, ekonomi, kinerja, pemerintahan, dan lain-lain. Pada gambar 1 yang menggambarkan jaringan antar penelitian terdahulu terkait CG. Setiap klaster berwarna mewakili tema tertentu, seperti kolaborasi aktor, peran komunitas dan pemangku kepentingan dalam ekonomi, mekanisme dan kinerja, serta kemitraan dan efektivitas pasar. Gambar ini juga menggambarkan bagaimana CG melibatkan banyak aspek, mulai dari kolaborasi antaraktor, pengembangan komunitas, hingga kemitraan lintas sektor, semuanya saling berinteraksi untuk mendukung proses tata kelola yang efektif. Studi tentang CG juga melibatkan eksplorasi penggunaan kecerdasan buatan dan blockchain untuk memvisualisasikan data serta proses tata kelola kemiskinan relatif di pedesaan (Tian & Ge, 2022), pengaruh keputusan multiagen terhadap tata kelola kolaboratif dalam penanggulangan kemiskinan berbasis sasaran (Zhang et al., 2020), dan kolaborasi lintas sektoral dalam menciptakan nilai antara sektor publik dan swasta (Florini & Pauli, 2018).





Gambar 1. Penelitian terdahulu *CG* melalui visualisasi *VosViewer*
Sumber: Diolah oleh Peneliti, menggunakan *VosViewer*, 2024

Sedangkan penelitian ini berfokus pada penerapan *CG* dalam aspek kemandirian pangan sebagai upaya penanggulangan kemiskinan, menggunakan model *CG* dari (Weber et al., 2005) yang menekankan kolaborasi berbasis pemecahan masalah kapasitas antar-aktor terkait. Konsep *CG* ini juga penting untuk mengintegrasikan fungsi birokrasi, kebijakan lintas sektor, berbagai level pemerintahan, dan partisipasi masyarakat (Astuti et al., 2020).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Siyoto & Sodik, 2015), Metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif digunakan untuk menggali penerapan Collaborative Governance (CG) dalam mendukung kemandirian pangan sebagai upaya penanggulangan kemiskinan. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam kolaborasi antarpemangku kepentingan dan bagaimana mereka bekerja sama dalam mengatasi tantangan terkait kemandirian pangan.

Adapun data yang dikumpulkan melalui dokumentasi publik seperti berita online, dokumen laporan pemerintah, materi audio visual seperti foto dan videotape online dari youtube maupun media sosial lainnya yang kemudian dilakukan analisis dan pengambilan kesimpulan oleh Peneliti (Creswell, 2014). Berbagai sumber primer dan sekunder yang dikumpulkan, dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai penerapan CG. Data primer meliputi dokumentasi publik, seperti berita online, laporan pemerintah, dan materi audiovisual dari platform online (misalnya, YouTube dan media sosial lainnya) untuk menangkap beragam perspektif. Sumber data sekunder mencakup literatur terkait konsep Collaborative Governance dan penerapannya dalam kemandirian pangan serta kebijakan penanggulangan kemiskinan.

Data dikumpulkan melalui beberapa teknik untuk mendapatkan informasi yang mendalam dan kaya mengenai topik penelitian:

- Studi Dokumentasi: Mengumpulkan dan menganalisis berbagai dokumen publik seperti laporan pemerintah, kebijakan, berita online, dan dokumen terkait lainnya yang membahas penerapan CG dalam kemandirian pangan.
- Observasi Online: Mengamati materi audiovisual dari sumber online, termasuk video dan foto dari platform seperti YouTube dan media sosial yang menampilkan kolaborasi antarpemangku kepentingan dalam program-program kemandirian pangan.

Data dianalisis menggunakan pendekatan analisis tematik, di mana informasi yang diperoleh dikelompokkan ke dalam tema-tema tertentu sesuai dengan model Collaborative Governance dari Weber et al. (2005), yang berfokus pada kolaborasi berbasis pemecahan masalah kapasitas antarpemangku kepentingan. Proses analisis ini mencakup langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Reduksi Data: Mengidentifikasi dan merangkum informasi penting yang relevan dengan kolaborasi dan kemandirian pangan.
- b. Kategorisasi: Mengelompokkan data berdasarkan tema utama seperti peran birokrasi, kebijakan lintas sektor, level pemerintahan, dan partisipasi masyarakat, sesuai dengan prinsip CG.
- c. Penyimpulan dan Verifikasi: Mengambil kesimpulan dari temuan dan memverifikasinya untuk memastikan konsistensi dan relevansi dengan tujuan penelitian.

Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber dan teknik pengumpulan data. Triangulasi dilakukan dengan mengonfirmasi data yang diperoleh dari dokumentasi publik dengan observasi online, serta mengaitkannya dengan literatur yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Collaborative Governance

Framework atau kerangka kerja CG oleh (Weber et al., 2005) memperhatikan sentralitas kapasitas kolaboratif untuk keberhasilan pemecahan masalah jangka panjang. Kerangka kerja ini mengembangkan hasil kapasitas di sepanjang beberapa dimensi, yaitu vertikal, horizontal, dan hubungan kemitraan antar aktor yang terlibat dan diterapkan pada kolaborasi. Pada konteks penelitian ini, kebijakan kemandirian pangan melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang membentuk tim khusus G-SMP melalui proses kolaborasi dari Dinas Ketahanan Pangan, Badan Perencanaan dan Pembangunan daerah, Dinas Sosial, serta Badan Penelitian dan Pengembangan. Kemudian juga berkolaborasi dengan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, komunitas tani, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan terutama rumah tangga atau masyarakat yang membutuhkan. Banyaknya pihak yang terlibat, maka perlunya sinergitas untuk mengoptimalkan kapasitas para aktor.

CG dalam penanggulangan kemiskinan melalui kebijakan kemandirian pangan di Provinsi Sumatera Selatan.

Dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan, kebijakan kemandirian pangan menjadi salah satu solusi strategis yang krusial, terutama bagi rumah tangga miskin. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan lokal, tetapi juga dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Pemanfaatan perkarangan rumah sebagai lahan pertanian dapat memberikan kontribusi dalam penyediaan pangan bagi rumah tangga miskin, sambil meningkatkan ketahanan pangan di tingkat keluarga. Untuk itu Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah menetapkan target, syarat peneirma bantuan, serta jenis kegiatan kepada penerima bantuan yang dapat dilihat pada tabel 1.

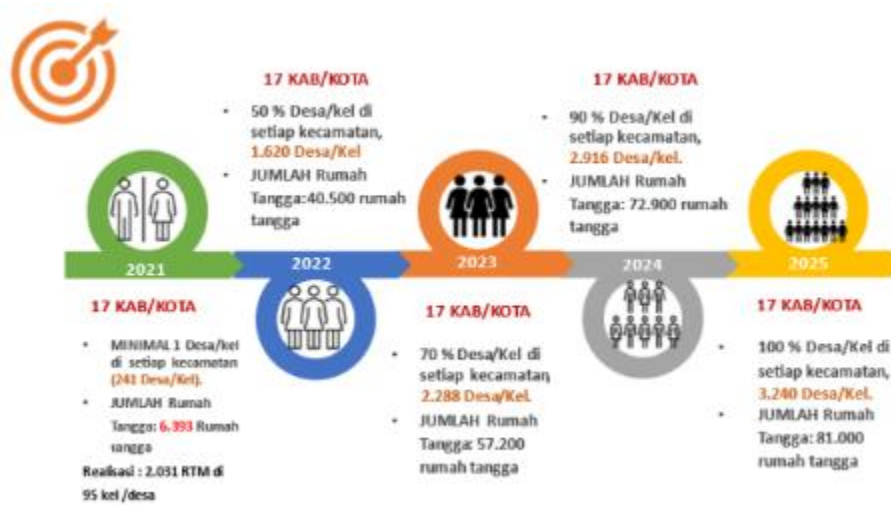
Tabel 1. Target, syarat, dan jenis kegiatan kebijakan G-SMP

Target G-SMP	Syarat Penerima Bantuan G-SMP	Jenis Kegiatan
Menurunkan angka kemiskinan di 17 kabupaten/kota se-Sumatera Selatan Keluarga mandiri pangan dalam pemenuhan gizi keluarga. Masyarakat mempunyai kemampuan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi keluarga melalui pengembangan katersediaan, distribusi, dan konsumsi pangan dengan memanfaatkan	Rumah Tangga miskin yang ada dalam data terpadu (DTKS yang masuk persentil 12 dari DTKS 40%). Belum menerima bantuan yang sama dari program bansos APBN. Bersedia bergabung dalam kelompok. Bersedia ikut program dan tanda tangan pakta integritas.	Budidaya Tanaman; budidaya tanaman sayur, cabe, bumbu, dan lainlain di lahan pekarangan atau menggunakan pot. Budidaya Ikan; budidaya ikan menggunakan kolam terpal, drum, tong, atau kolam tanah Budidaya Ternak Unggas; budidaya ayam kampung petelor maupun untuk dimanfaatkan dagingnya

Sumber: (Agustien et al., 2024)

Penentuan target kebijakan, syarat penerima bantuan, dan jenis kegiatan dalam kebijakan kemandirian pangan sangat penting untuk mencapai hasil yang efektif dan berkelanjutan. Target yang jelas, seperti menurunkan angka kemiskinan di rumah tangga miskin, memastikan bahwa program fokus pada kelompok yang membutuhkan, sementara syarat penerima bantuan membantu mencegah penyalahgunaan dan mendorong partisipasi aktif dalam kelompok (Holqi & Salam, 2024). Selain itu, jenis kegiatan yang relevan, seperti budidaya tanaman, ikan, dan ternak unggas, memberikan solusi praktis bagi masyarakat untuk meningkatkan akses pangan dan pendapatan.

Penentuan target penerima bantuan telah ditentukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan mengacu pada syarat penerima bantuan G-SMP (tabel1). Penentuan target tersebut memunjukkan bahwa tim G-SMP perlu bekerja keras untuk menjalankan kebijakan ini, maka dari itu perlunya ada sinergitas dengan pihak-pihak lain sebagai bentuk kolaborasi dalam tata kelola pemerintahan. Berikut dijabarkan mengenai pelaksanaan kebijakan G-SMP berdasarkan teori dari (Weber et al., 2005).



Gambar 2. Target penerima bantuan G-SMP

Sumber: Dokumentasi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, 2024

Dimensi Vertikal

Dimensi kapasitas vertikal melibatkan hubungan hierarki antara entitas pemerintah dalam sistem federal serta antara lembaga, warga negara, dan organisasi non-pemerintah. Dengan demikian, dimensi vertikal berfokus pada wewenang hukum yang diberikan kepada para pengelola publik oleh pejabat yang terpilih secara demokratis dan tujuan dari program pemerintah resmi yang dilaksanakan oleh para pengelola. Pada kebijakan kemandirian pangan di Provinsi Sumatera Selatan telah diatur dan tertuang didalam (Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kemandirian Pangan, 2022) yang mencakup hak masyarakat dan prioritas pemerintah daerah, melakukan gerakan sumpsi mandiri pangan (G-SMP), sumber pembiayaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi, peran masyarakat, pembinaan, serta larangan. Pada kebijakan tersebut pemerintah mendorong masyarakat melalui pembinaan dan pembiayaan dalam rangka mengupayakan terpenuhinya hak warga miskin dalam meningkatkan ketersediaan pangan dengan memanfaatkan lahan perkarangan rumah serta berguna untuk menambahkan pendapatan masyarakat miskin. Selain itu organisasi non-pemerintah seperti BUMN dan BUMD juga membantu kebijakan tersebut melalui suntikan pendanaan, maupun dalam bentuk lainnya. Pada pelaksanaan kebijakan, para aktor terkait lebih cenderung berkolaborasi jika mereka bersama-sama berpartisipasi dalam forum kebijakan (Hamilton & Lubell, 2018).

Dimensi Horizontal

Dimensi kedua dalam kerangka kapasitas ini berasal dari pemahaman bahwa pemecahan masalah yang efektif untuk masalah-masalah berbasis wilayah yang sulit, memaksa pemerintah untuk bersifat saling ketergantungan dengan pihak lain yang bantuannya penting untuk manajemen masalah. Pada pemecahan masalah jangka panjang memerlukan interaksi yang berkelanjutan dengan mitra-mitra yang memiliki kekuatan lokal. Mitra yang memiliki kekuatan memiliki kapasitas pemecahan masalah yang tinggi dan menunjukkan komitmen kebijakan yang luas dan inklusif, dibandingkan dengan proses keputusan yang melibatkan hanya beberapa segmen komunitas. CG berbeda dari kolaborasi lainnya karena didasari oleh pemahaman bekerjasama untuk mengatasi masalah, tantangan, dan peluang (Ulibarri et al., 2020). Terdapat dua fitur utama dari kapasitas horizontal yaitu modal sosial dan komitmen institusional terhadap tujuan-tujuan program vertikal yang sudah ada.

Pada kebijakan ini, mitra horizontal meliputi komunitas yang memiliki modal sosial dan komitmen institusional dalam penyelenggaraan kebijakan serta menjadi salah satu bentuk *Corporate Social Responsibility (CSR)* seperti BUMD yaitu Bank Sumsel Babel sebagai tindak lanjut komitmen dalam membantu mengembangkan potensi daerah serta mengembangkan pertumbuhan ekonomi. Bank Sumsel Babel secara bertahap telah merealisasikan partisipasi ke berbagai daerah di Provinsi Sumatera Selatan seperti Kabupaten Pali, OKU, OKU Timur, Banyuasin, Muara Enim, Ogan Ilir, dan Kota Palembang. Partisipasi tersebut direalisasikan dalam bentuk bantuan bibit tanaman argokultural, bibit unggas, bibit ikan, dan lain sebagainya. Bantuan yang diberikan dari Bank Sumsel Babel kepada masyarakat penerima bantuan dapat memberikan dampak secara keberlanjutan. Untuk itu disini peran Pemerintah agar dapat terus melakukan pengawasan dan monitoring kepada masyarakat penerima bantuan, serta dapat menjadi percontohan dan mendorong minat masyarakat lainnya.



Gambar 3. Realisasi bantuan G-SMP

Sumber: Dokumentasi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, 2024

Dimensi Hubungan Kemitraan

Dimensi hubungan kemitraan mencakup hubungan antara agensi federal, negara, dan lokal, serta hubungan antara agensi-agensi tersebut dengan warga negara dan organisasi non-

pemerintah yang mewakili sektor sukarelawan dan swasta. Adapun sub-dimensi hubungan kemitraan yaitu tingkat kepercayaan, perundingan, pandangan mitra, dan sumber daya.

a. Tingkat kepercayaan

Pada proses *CG*, tingkat kepercayaan meliputi kepercayaan antar pejabat pemerintah dan warga masyarakat yang terlibat dalam kemitraan kegiatan. Secara khusus, bahwa efek kepercayaan individu terhadap hasil kolaboratif tergantung pada lingkungan kepercayaan keseluruhan, ketika kepercayaan kelompok rendah, kepercayaan individu memiliki efek terbatas pada hasil kolaboratif dibandingkan dengan ketika kepercayaan kelompok tinggi (Rapp, 2020). Partisipasi masyarakat merupakan suatu hal yang tidak bisa diabaikan karena kesejahteraan masyarakat tidak hanya sebagai subjek kegiatan maupun juga menjadi objek kegiatan. Oleh karena itu warga sangat berharap kebijakan mandiri pangan ini dapat membantu mereka dalam menanggulangi kemiskinan yang dialami. Pada konteks kebijakan G-SMP tingkat kepercayaan menjadi salah satu penghambat, karena beberapa kelompok masyarakat yang kurang terbiasa dengan kegiatan bertani terutama masyarakat yang berada di perkotaan dan lebih memiliki kecenderungan sebagai pembeli (konsumtif) bukan penghasil. Selain itu, hambatan lain yang dihadapi saat pelaksanaan G-SMP yaitu minimnya pengetahuan dan minat masyarakat mengenai bercocok tanam, dan melakukan budidaya ikan dan unggas di perkarangan rumah. Hambatan-hambatan tersebut dapat berdampak pada efektifitas G-SMP karena akan mempengaruhi kepercayaan Pemerintah dan BUMD terhadap mitra (masyarakat penerima bantuan). Maka dari itu meningkatkan pengetahuan melalui pendidikan non-formal seperti *workshop* dan sosialisasi kepada rumah tangga penerima bantuan sangat dibutuhkan karena pendidikan terbukti meningkatkan keterampilan dan pengetahuan individu (Novitasari & Imaningsih, 2024). Solusi ini melibatkan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat. Akademisi dapat berkontribusi sebagai fasilitator dan narasumber dalam memberikan edukasi terkait pentingnya kemandirian pangan. *Workshop* dan sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang manfaat bercocok tanam di lahan pekarangan, termasuk keunggulan dari segi perekonomian. Dengan memberikan pengetahuan praktis serta bukti keberhasilan dari komunitas lain, diharapkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap G-SMP akan meningkat. Akademisi juga dapat memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah daerah berdasarkan hasil riset dan dampak nyata dari kegiatan ini, sehingga kebijakan kemandirian pangan menjadi lebih efektif dan berkelanjutan.

b. Perundingan

Penilaian perundingan dilakukan adalah sejauh mana peserta percaya bahwa para aktor akan memenuhi janjinya sesuai kesepakatan dan informasi yang diungkapkan. Pada kebijakan mandiri pangan Sumsel, para mitra yang terlibat seperti pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan melakukan penandatanganan nota kesepakatan atau *Memorandum of Understanding (MoU)* dengan Bank Sumsel Babel dan para kepala daerah dalam rangka membangun komitmen secara formal khususnya dalam akuntabilitas keuangan pada pelaksanaan kebijakan mandiri pangan. Namun tidak dipungkiri bahwa sering kali *CG* antar aktor tidak mampu menghasilkan pemahaman bersama tentang aturan dasar dalam pengambilan keputusan (Vihma & Toikka, 2021).

c. Pandangan mitra

Pandangan mitra merupakan sikap mitra dalam meninjau suatu kegiatan, apabila sikap positif maka mitra akan bersedia untuk bergabung dalam kemitraan kolaboratif dimasa depan. Permasalahan kolaborasi lintas sektoral sering kali ditandai oleh kurangnya keterlibatan mitra non-pemerintahan (Woldesenbet, 2018). Kebijakan mandiri pangan merupakan kebijakan yang selaras dengan misi dari Bank Sumsel Babel yaitu membantu mengembangkan potensi daerah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, maka dari itu semenjak peluncuran kebijakan pada tanggal 2 desember 2021, Bank Sumsel Babel telah ikut serta dalam membantu pelaksanaan kegiatan dengan memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat miskin.

d. Sumber daya

Sumber daya dalam kolaborasi meliputi sumber daya manusia, dukungan politik, dan finansial dalam rangka mencapai tujuan bersama. Kurangnya akses terhadap sumber daya dapat menghambat substansi kebijakan (Koski et al., 2016). Pada pelaksanaan kebijakan mandiri pangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan membentuk Tim yang tertuang dalam (Surat Keputusan Gubernur Nomor 659/KPTS/DKPP/2021 Tentang Pembentukan Tim Gerakan Sumatera Selatan Mandiri Pangan, 2021). Tim tersebut dibentuk sebagai bentuk keseriusan dan dukungan politik pemerintah Provinsi dalam melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan melalui kebijakan mandiri pangan. Selain itu dalam penyelenggaraan kebijakan, pemerintah menggunakan sumber pendanaan APBD yang telah dialokasikan serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat seperti bantuan keuangan yang diberikan mitra seperti Bank Sumsel Babel dalam bentuk uang kepada masyarakat miskin secara langsung.

Secara keseluruhan, keterkaitan antara dimensi vertikal, horizontal, dan kemitraan dalam konteks G-SMP di Provinsi Sumatera Selatan merupakan hal yang utama dalam keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berperan sebagai inisiator kebijakan untuk merumuskan dasar hukum, Bank Sumsel Babel berperan sebagai kontributor untuk memberikan bantuan-bantuan kepada penerima, dan masyarakat sebagai partisipator untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Selain itu akademisi juga dapat dilibatkan sebagai fasilitator dan narasumber untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam G-SMP.

SIMPULAN

Collaborative Governance pada kebijakan mandiri pangan di Provinsi Sumatera Selatan sudah terselenggara. Berdasarkan peninjauan dengan menggunakan framework CG dari Weber sebagian besar dimensi dan sub-dimensi telah terpenuhi. Pada dimensi vertikal Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah memberikan dasar hukum untuk pelaksanaan kebijakan, dimensi horizontal Bank Sumsel Babel memberikan bantuan-bantuan kepada penerima G-SMP, dan dimensi hubungan kemitraan yang telah melalui perundingan, dan adanya pandangan positif oleh mitra, serta adanya alokasi berbagai sumber daya untuk menyukseskan G-SMP. Namun pada dimensi hubungan kemitraan sub-dimensi tingkat kepercayaan menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan kebijakan G-SMP karena masih kuatnya budaya konsumtif di masyarakat perkotaan dan minimnya pengetahuan mengenai bercocok tanam di perkarangan rumah. Oleh karena itu, diperlukan workshop dan sosialisasi yang dapat diberikan oleh akademisi untuk meningkatkan pengetahuan dan minat masyarakat khususnya masyarakat perkotaan, serta membangun kepercayaan melalui keterlibatan aktif masyarakat dalam kebijakan ini. Apabila Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah mengatasi hambatan tersebut, bukan tidak mungkin bahwa kebijakan mandiri pangan di Provinsi Sumatera Selatan dapat menjadi salah satu solusi dan menjadi percontohan bagi seluruh Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia dalam penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustien, D., Fahri, M., & Lestari, A. (2024). Analisis Implementasi Program Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (G-Smp) Bagi Kelompok Budidaya Ikan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(1), 17–22. <https://doi.org/10.54895/jipu.v3i1.2486>
- Astuti, R., Warsono, H., & Rachim, A. (2020). Collaborative Governance Dalam Perspektif Administrasi Publik. In T. D. Press (Ed.), *Universitas Diponegoro Press* (Pertama). Universitas Diponegoro Press.
- Clapp, J. (2017). Food self-sufficiency: Making sense of it, and when it makes sense. *Food Policy*, 66, 88–96. <https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2016.12.001>
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design, Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (Fourth). SAGE Publication.
- Florini, A., & Pauli, M. (2018). Collaborative governance for the Sustainable Development Goals. *Asia and the Pacific Policy Studies*, 5(3), 583–598. <https://doi.org/10.1002/app5.252>
- Hamilton, M., & Lubell, M. (2018). Collaborative Governance of Climate Change Adaptation Across Spatial and Institutional Scales. *Policy Studies Journal*, 46(2), 222–247. <https://doi.org/10.1111/psj.12224>

- Handayani, N., Risianti, R., Suripto, S., & Simangunsong, F. (2023). Collaborative Governance Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 13(1), 66–67. <https://doi.org/10.33701/jiwbp.v13i1.3329>
- Holqi, F. G. F., & Salam, A. (2024). Collaborative Governance Sebagai Alternatif Pemerintah Daerah dan Perseroan Dalam Mengatasi Permasalahan Sektor Pertambangan: Studi Program TJSI Tambang Galian C PT. AMS di Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 9(1), 78–87. <https://doi.org/10.36982/jpg.v9i1.3665>
- Koski, C., Siddiki, S., Sadiq, A., & Carboni, J. (2016). *Representation in Collaborative Governance : A Case Study of a Food Policy Council*. <https://doi.org/10.1177/0275074016678683>
- Novitasari, N., & Imaningsih, N. (2024). Analisis Pengaruh Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, Produk Domestik Regional Bruto, dan Rata -Rata Lama Sekolah Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Sampang. *JAMBURA ECONOMIC EDUCATION JOURNAL*, 6(2), 443–454.
- Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kemandirian Pangan, Pub. L. No. 22, 22 (2022).
- Rapp, C. (2020). Hypothesis and Theory: Collaborative Governance, Natural Resource Management, and the Trust Environment. *Frontiers in Communication*, 5(May), 1–12. <https://doi.org/10.3389/fcomm.2020.00028>
- Sadayi, D. P., Sianturi, S., & Salsabila, L. (2022). Collaborative Governance dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo. *Dialektika Publik : Jurnal Administrasi Negara Universitas Putera Batam*, 6(1), 28–34. <https://doi.org/10.33884/dialektikapublik.v6i1.5452>
- Sinurat, R. P. P. (2023). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Registratie*, 5(2), 87–103. <https://doi.org/10.33701/jurnalregistratie.v5i2.3554>
- Siyoto, S., & Sodik, A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian* (Pertama). Literasi Media Publishing.
- Surat Keputusan Gubernur Nomor 659/KPTS/DKPP/2021 Tentang Pembentukan Tim Gerakan Sumatera Selatan Mandiri Pangan (2021).
- Tian, X. J., & Ge, Z. J. (2022). Collaborative Governance of Rural Relative Poverty under Blockchain and Back Propagation Neural Network. *Advances in Multimedia*, 2022. <https://doi.org/10.1155/2022/5344163>
- Ulibarri, N., Emerson, K., Imperial, M. T., Jager, N. W., Newig, J., & Weber, E. (2020). *How does collaborative governance evolve ? Insights from a medium-n case comparison*. 39(4), 617–637.
- Vihma, P., & Toikka, A. (2021). The limits of collaborative governance: The role of inter-group learning and trust in the case of the Estonian “Forest War.” *Environmental Policy and Governance*, 31(5), 403–416. <https://doi.org/10.1002/eet.1952>
- Weber, E. P., Lovrich, N. P., & Gaffney, M. (2005). Collaboration, enforcement, and endangered species: A framework for assessing collaborative problem-solving capacity. *Society and Natural Resources*, 18(8), 677–698. <https://doi.org/10.1080/08941920591005034>
- Woldesenbet, W. G. (2018). Collaborative governance: assessing the problem of weak cross-sectoral collaborations for the governance of Addis Ababa Rivers. *Applied Water Science*, 8(4), 1–24. <https://doi.org/10.1007/s13201-018-0763-1>
- Zhang, N., Zhang, X., Lei, M., & Yang, Y. (2020). Multiagent Collaborative Governance for Targeted Poverty Alleviation from the Perspective of Stakeholders. *Complexity*, 2020. <https://doi.org/10.1155/2020/8276392>

